
PENGARUH PENYAJIAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN TINGKAT PENGUNGKAPAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

(STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN KLATEN)

Andika Prakoso

Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article History:
5 Desember 2015
5 Januari 2016
23 Januari 2016

Keywords:
Transparansi
Akuntabilitas
Aksesibilitas

ABSTRACT

This study aims to get empirical evidence about affecting the presentment, accessibility financial statement, and level of disclosure against transparency and financial management accountability.

This study implemented in District of Klaten, data collection method in this research is use of a questionnaire survey. The questionnaire submitted to the users of financial statement in, who are apparatus DPPKAD, DPRD and the society. Sample collecting by purposive sampling, a total of 130 questionnaire were distributed, back 121 questionnaire, and can be generated as much as 116 questionnaires. The data collected were processed using multiple linier regression analysis.

The results showed that presentment have significant positive effect on the transparency and financial management accountability. Accessibility financial statement have a negative effect to the transparency and financial management accountability. Level of disclosure have significant positive effect on the transparency and financial management accountability.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi

tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Seiring dengan perkembangan sektor public yang terjadi di Indonesia akhir-akhir

ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik (Stanbury, 2003). Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Informasi laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

PENURUNAN HIPOTESIS

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002). Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami (PP No. 71

Tahun 2010) dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 2002).

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam mewujudkan laporan keuangan yang baik dimana didalam laporan keuangan tersebut terdapat unsur transparansi dan akuntabilitas adalah dengan menyajikan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

H₁ : Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002). Menurut (Mulyana, 2006) Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak hanya disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibilitas pada pengguna potensial (Jones *et al.*, 1985) dalam (Anies 2012)

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik, aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Suatu proses inilah yang merupakan suatu media untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah, sehingga tercipta suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Anies, 2012),

Hasil penelitian terdahulu mengenai aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dilakukan oleh Mulyana (2006) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

H₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Wolk *et al* (2004) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan keseluruhan informasi yang ada dalam laporan keuangan dan komunikasi tambahan yang terdiri dari catatan kaki, kejadian setelah tanggal neraca, analisis manajemen dan informasi tambahan diluar biaya historis.

Darwin (2007) dalam Novita (2008) menyatakan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi didalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders* lainnya.

H₃ : Sistem Informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten klaten. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Yang dalam hal ini populasi yang dituju adalah DPRD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten dan anggota Masyarakat.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Yang dalam hal ini populasi yang dituju adalah DPRD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten dan anggota masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survey dengan mendistribusikan kuisisioner terhadap pengguna laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan kabupaten klaten.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X₁) aksesibilitas laporan keuangan daerah (X₂) dan tingkat pengungkapan (X₃).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan Laporan keuangan organisasi sektor public merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002).

Laporan keuangan pokok terdiri dari (a) laporan realisasi anggaran, (b) neraca, (c) laporan arus kas, dan (d) catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan lampiran II PP No. 24 Tahun 2005 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan poin 32-37 bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor.

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert dimana responden yang mengisi kuesioner menyatakan sangat setuju atau tidak setuju dari pertanyaan yang di kuesioner.

Tingkat pengungkapan adalah informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan daerah. Pengukuran variabel menggunakan skala Likert dimana responden yang mengisi kuesioner menyatakan sangat setuju atau tidak setuju dari pertanyaan yang di kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian laporan keuangan yang baik adalah dengan mencerminkan berbagai faktor salah satunya adalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan daerah dengan baik sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diterima umum. Maka dari itu semakin baiknya laporan akuntansi maka terciptalah penyajian yang baik pula sehingga semakin baik penyajian laporan keuangan semakin meningkatnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel penyajian (H1) diperoleh hasil bahwa penyajian berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Hasil ini sejalan dengan peneliti yang dilakukan oleh Sastra (2013) yang menyatakan penyajian berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Mulyana (2006), juga menyatakan bahwa penyajian berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas setidaknya pemerintah daerah harus menyampaikan laporan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas. Selain menyajikan laporan keuangan hendaknya pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan itu sendiri. Tetapi hal yang terjadi disini adalah pemerintah sudah memberikan akses yang mudah bagi pengguna laporan keuangan namun tingkat mengakses laporan keuangan yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri sangatlah rendah. Sehingga tingkat aksesibilitas laporan keuangan itu sendiri menjadi rendah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan (H2) diperoleh hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel tingkat pengungkapan (H3) diperoleh hasil bahwa tingkat pengungkapan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian, aksesibilitas laporan keuangan dan tingkat pengungkapan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Klaten.

Penyajian berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini didukung dengan Variabel penyajian (P) mempunyai koefisien regresi sebesar +0,255 dengan nilai signifikansi $0,004 < \alpha < 0,05$. Artinya penyajian berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan demikian H_1 diterima.

Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini didukung dengan Variabel Aksesibilitas (A) mempunyai koefisien regresi sebesar +0,073 dengan nilai signifikansi $0,487 > \alpha < 0,05$. Artinya aksesibilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan demikian H_2 ditolak.

Tingkat pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini didukung Variabel Tingkat Pengungkapan (TP) mempunyai koefisien regresi sebesar +0,288 dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha < 0,05$. Artinya tingkat pengungkapan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan demikian H_3 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M. 2000. Menggapai kedaulatan untuk rakyat. Mizan, Bandung
- Belkaouli, Ahmed Riahi, 2001. *Teori Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Edisi 2 Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan keempat, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Governmental Accounting Standard Board, 1998, *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- [Http://www.semarang .bpk.go.id/?P=2759](http://www.semarang.bpk.go.id/?P=2759). Diakses 6 mei 2015
- Jones, D. B, 1985." The Needs of Users of Governmental Financial Reports". *Government Accounting Standards Board*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
- Koestoer, Hendro."Penduduk dan Aksesibilitas Kota: Persepektif Tata Ruang Lingkungan". <http://www.worldcat.org>. Diakses tanggal 15 juni 2015
- LAN. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, M. Sulistiyowati, F. Dan Andre Purwanugraha, H. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta

- Mardiasmo. 2006, "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik": Suatu Sarana Good Governace, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No.1, Mei 2006.
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Mustofa, I. A. 2012. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang, *skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Nazaruddin, I dan Basuki, A. T. 2015. *Analisis statistik dengan SPSS*. Penerbit Danisa Media: Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ke-8. Terjemahan Handyana Pujatmaka. Jakarta : PT Prenhallindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Punch f. Keith 2003. *Survey research-the basics*. London: SAGE Publication
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Pratisto, Arif (2004), Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Safitri, Ratna Amalia, 2009, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilita Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiri Di Kabupaten Semarang), *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sande, Peggy, (2013). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Skripsi*. Padang: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Sastra, Yuni. (2013). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Meda". *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Medan
- Siallagan, H., dan Mas'ud Machfoedz. 2006. *Mekanisme Corporate Government, Manajemen Laba Dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi X., Makassar
- Stanbury, W.T. (2003). *Accountability To Citizens In The Westnnster Model*

- Of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication: Canada
- Subaweh, Imam. (2008). Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah. <http://www.google.com>. Diakses tanggal 15 juni 2015.
- Sujana, Edy. (2002). User's of Public Sector Financial Report Perception of Financial Accountability Reporting of Local Government. *Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik*, Vol.3. No.1
- Wilson, Earl dan Susan C. Kattelus. (2002). *Accounting for Governmental and Nonprofit Entities*, 13 th Edition. Columbia: McGraw-Hill Irwin.
- Wolk, Harry I., et al. (2004). *Accounting Theory Conceptual Issues In A Political And Economic Environment Sixth Edition*. Ohio: Thomson Learning
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.